

## **PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

*Renalde Pit Serang<sup>1</sup>  
Frans Singkoh<sup>2</sup>  
Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah, pariwisata juga telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor industri, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Baliranggeng oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata. Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata, Pantai Baliranggeng.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki spot pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai daerah kepulauan kabupaten Sitaro sebagai destinasi wisata yang memiliki tempat-tempat yang dapat dinikmati keindahannya baik wisata alam, budaya, sejarah, seni dan lainnya. Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat potensial dan mempunyai prospek pengembangan, namun sektor tersebut belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dapat diamati dari adanya berbagai potensi wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam yang belum “disentuh” atau dikembangkan. Padahal sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sitaro belum sepenuhnya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata, perlu dilakukan pemantauan atau evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan input dan output pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata. Evaluasi dapat dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program untuk mengukur indikator-indikator, yaitu; menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai, menentukan apakah terdapat manfaat

dari program dan menentukan suksesan keseluruhan pelaksanaan program.

Dalam Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (pasal 1) menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Maka dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang bertanggungjawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata didasarkan pada potensi yang dimiliki kabupaten Sitaro yang memang memiliki daya tarik wisata yang unik, peninggalan budaya memberikan warna dan makna tersendiri bagi siapa saja yang mengunjungi daerah ini. Penduduk yang ramah, budaya yang asli dan lestari menjadikan Kabupaten Sitaro menjadi potensi daerah tujuan wisata Sulawesi Utara. Kabupaten Sitaro merupakan aset nasional yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah baik pusat daerah dan bahkan masyarakat agar kebudayaan di Kabupaten Sitaro lebih

terawat dan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan pariwisata dan kebudayaan sebagai tempat wisata domestik dan internasional.

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro memiliki banyak obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, dan peninggalan purbakala. Dengan latar belakang potensi wisata yang ada di Kabupaten Sitaro yang belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangat strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut melalui kepemimpinan institusinya bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Maka daripada itu pariwisata daerah perlu mendapat perhatian lebih mendalam khususnya aset-aset wisata yang memiliki potensi wisata yang bukan saja bernilai historis melainkan aset wisata yang berpotensi ekonomis. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, maka industri pariwisata dijadikan salah satu sektor andalan dimana pariwisata dianggap sebagai

salah satu industri yang menimbulkan efek ganda bagi sektor lainnya. Menjadikan suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata andalan diperlukan adanya suatu perencanaan strategi yang baik dan adanya introspeksi terhadap isu/faktor strategis, sehingga dengan adanya strategi yang baik dalam pengembangan sektor pariwisata maka akan meningkatkan penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dengan demikian dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sitaro, saat ini terdapat potensi alam untuk dijadikan wisata pantai di Pantai Pasir Putih Balirangeng yang terletak di Kecamatan Siau Timur Selatan, potensi wisata alam ini belum dikelola oleh pemerintah kabupaten melalui dinas pariwisata kabupaten Sitaro, sampai dengan saat ini pengelolaan kedua objek wisata tersebut masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat lokal, dimana fasilitas-fasilitas standart sebagai tempat wisata belum tersedia, sehingga promosi-promosi yang dilakukan hanyalah bersifat lokal, belum diketahui oleh masyarakat yang ada di daerah lain, apalagi oleh turis mancanegara, kendala lainnya adalah kurangnya sarana transportasi, baik darat maupun laut, dimana untuk sarana transportasi darat, infrastruktur jalan yang belum memadai, juga kendaraan yang belum cukup, sebagai daerah kepulauan transportasi laut melalau kapal-kapal yang ada perlu di perbaiki, karena sampai dengan saat ini hanyalah kapal-kapal nelayan yang dijadikan sebagai sarana transportasi laut. Selanjutnya dari pihak masyarakatpun sebenarnya sangat mendukung kedua lokasi ini untuk dikelola lebih baik lagi, agar dapat mendukung perekonomian

masyarakat lokal, sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa masyarakat berharap pemerintah kabupaten sitaro melalui dinas pariwisata segera memaksimalkan pengelolaan terhadap objek wisata pantai ini.

Meskipun Kabupaten Sitaro memiliki sejumlah potensi alam dan budaya yang dapat diandalkan, namun sebagian besar belum tergarap secara maksimal. Ada banyak permasalahan yang ditemui, dimana keberadaan/letak dari objek wisata tidak diketahui oleh masyarakat dan wisatawan, infrastruktur yang belum menunjang, sarana transportasi, serta belum tersedianya agen-agen travel yang menyediakan jasa perjalanan wisata di kabupaten Sitaro. Sebagian besar area wisata jauh dan bahkan tidak terjangkau dari akses transportasi, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat apalagi wisatawan luar. Kabupaten Sitaro sebagai daerah kepulauan membutuhkan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga wisatawan dari luar. Sarana dan prasarana yang ada belum mampu menjangkau seluruh pelosok desa dan kualitasnya pun masih rendah. Banyak pengelolaan wisata alam dan budaya di Sitaro dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Jalan yang merupakan prasarana utama di daerah ini dalam memperlancar kegiatan perekonomian di semua sektor dipandang masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Hasil pengamatan awal diperoleh informasi bahwa objek wisata Pantai Baliranggeng tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan dalam proses pembangunannya pun tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal ini kemudian membuat

masyarakat kurang mempedulikannya, bahkan tidak mendukung. Juga belum adanya tourism center untuk mempermudah wisatawan mengetahui tentang pariwisata di daerah tersebut. Disamping itu sistem pemasaran yang kurang luas atau bahkan tidak tepat sasaran. Tidak hanya hal tersebut yang menjadi masalah, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola kurang berkompeten dalam masalah pariwisata. Pada kenyataannya belum diketahui dengan jelas apakah Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sitaro ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, apakah pencapaian tujuan dan sasaran program telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Dinas Pariwisata sebagai salah satu SKPD yang berhubungan langsung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Sitaro pada kenyataannya belum mampu menunjukkan kinerja yang maksimal, hal ini terungkap lewat hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, dimana peneliti menemukan adanya capaian/target yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP 2017) dimana rencana program belum dapat seratus persen di realisasikan, hal ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pencapaian kinerja dari dinas pariwisata, terlebih lagi program yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Sitaro.

## **Tinjauan Pustaka**

Sektor pariwisata yang sudah mendunia dan menyedot banyak wisatawan mancanegara bahkan lintas negara, juga pada akhirnya mampu menjadi duta bangsa yang mengabarkan pada dunia, eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia. Menjadi duta kepada

dunia dan mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, aman, kondusif, maju dan sejahtera. Sektor pariwisata ini dapat memberi gambaran wajah Indonesia kepada dunia internasional (Arsyad, 2003:24).

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dalam arti bahwa pariwisata jika di kelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi secara langsung pada masyarakat di sekitar daerah pariwisata, terutama dari sektor perekonomian. Secara tidak langsung pariwisata memberikan kontribusi signifikan kepada PAD suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu Negara. Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi daerah adalah adanya daerah basah dan daerah kering. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama. Daerah yang kaya akan sumber daya alam otomatis menjadi daerah basah seiring dengan bertambahnya perolehan PAD-nya dari sektor migas misalnya, sedangkan daerah yang minus sumber daya alam otomatis menjadi daerah kering. Namun demikian tidak berarti daerah yang miskin dengan sumber daya alam tidak dapat meningkatkan PAD-nya, karena jika dicermati ada beberapa potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan dari sektor lain seperti sektor pariwisata. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis World Travel and Tourism Council (WTTC), industri pariwisata

menyumbang 9,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada saat ini dan diperkirakan pada tahun 2007 akan meningkat menjadi 10,1%. Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US\$ 4,798 miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US\$ 4,037 miliar (Marpaung, 2006:21-23).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar (Burhan Bungin, 2005:12).

Penelitian ini di fokuskan pada strategi pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Sitaro, melalui objek wisata pantai pasir putih balirangeng di Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang dikaji berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Pendit Nyoman (2007:21) yaitu:

1. Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Sitaro, yang meliputi:
  - a. Prioritas pengelolaan pariwisata
  - b. Anggaran
  - c. Promosi
2. Kendala, Hambatan, Tantangan dalam pengelolaan pariwisata
3. Strategi pengembangan pariwisata

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan, pegawai dan staf yang mengetahui informasi secara rinci tentang Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Sitaro, adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas Pariwisata 1 orang
- Sekretaris Dinas 1 orang
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan 1 orang
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Wisata 1 orang
- Masyarakat lokal 4 orang

## Hasil Penelitian

Pengelolaan pariwisata yang menjadi prioritas melalui dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Sitaro, mengikuti peta yang telah ditetapkan yaitu objek wisata unggulan. Untuk pengelompokan dan klasifikasi objek wisata telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang meliputi wisata alam, dan wisata sejarah.

Sampai dengan saat ini, prioritas pengelolaan pariwisata alam, khususnya wisata bahari belum semua objek dikelola, masih banyak objek yang belum dikelola, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, namun hal ini sudah di input dalam target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk anggaran tahun berikutnya.

Sebagai daerah otonom yang terbilang baru dimekarkan, Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai dengan saat ini belum terlalu memfokuskan prioritas pembangunan industri pariwisata, dimana manajemen pengelolaan yang belum maksimal, terutama dukungan kebijakan mengenai anggaran yang di gunakan, apabila melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk tahun 2014 ini, hanya sekitar 4% atau Rp. 2,230 Miliar.

Disisi lain, penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pariwisata mengalami peningkatan,

dalam memberikan kontribusi kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun sampai laporan penelitian ini dibuat, dinas terkait enggan menyebutkan nominal angka tersebut.

Promosi potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai sejauh ini masih menggunakan leaflet, brosur, serta pameran-pameran pembangunan baik yang diselenggarakan di tingkat provinsi, maupun lokal. Promosi yang dilakukan melalui website, belum dapat dilakukan karena masih belum tersedianya jaringan internet yang memadai, sehingga pengelolaan website belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi terhadap pengelolaan kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah isu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hal ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dan ditentukan apa dampak yang mungkin timbul serta kemudahan yang ada dalam rangka membangun sistem perencanaan pembangunan daerah yang profesional. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- 1) Belum efektifnya regulasi dalam rangka efektifitas pengembangan dan pengendalian pembangunan pariwisata. Berkenaan dengan itu otonomisasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan dituntut adanya peraturan terhadap fungsi pelaksanaan secara optimal pada pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata. Adanya sarana dan prasarana yang representatif pada

kawasan site wisata merupakan daya tarik tertentu untuk dikunjungi wisatawan. Namun, kondisi sarana dan prasarana belum memadai.

- 3) Tidak adanya koordinasi dan keterpaduan program antar stakeholder maupun sektor terkait. Peran serta keterlibatan stakeholders dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata masih sangat kurang, terutama dalam pengembangan suatu kawasan.
- 4) Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata yang professional dan berkemampuan tinggi. Kurangnya kualitas human resources yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan yakni the right man and the right place. Pelaku pariwisata sangat kurang jumlahnya dan kualitasnya tidak sesuai dengan sumber daya yang ada di dinas maupun di lapangan.
- 5) Belum optimalnya program promosi dan pemasaran yang memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pelaksanaan promosi wisata daerah belum optimal digarap, unsur promosi pariwisata diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- 6) Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata dan kebudayaan daerah. Perlunya pengembangan dan pelestarian kawasan destinasi, seperti untuk kawasan obyek wisata budaya dan sejarah sebagai daerah destinasi dan obyek pariwisata unggulan.
- 7) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan. Diperlukan penanganan yang professional dari stakeholders

keterlibatan stakeholders dalam usaha pengembangan pariwisata yang diarahkan kepada adanya kebersamaan (mutuality) pola pikir bersinergi dalam membangun pariwisata daerah.

Perumusan strategis merupakan salah satu jenis perencanaan yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor ini karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Keputusan-keputusan tersebut perlu dilihat dari sudut pandang misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, untuk mengetahui cara-cara perumusan strategi yang paling cocok.

## Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata.
2. Promosi Kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Anime Positif masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di pantai Balirangeng,

lamban direspon oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus, baik oleh pemerintah, maupun pihak swasta.

## Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya lokasi wisata pantai Balirangeng.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara.
3. Respect pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkannya kepariwisataan yang ada di Kepulauan Sitaro.

## DAFTAR PUSTAKA

Bungin Burhan, 2005. Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta.

Dwiyanto, Agus, dkk, 2008, Reformasi Birokrasi di Indonesia, Cetakan Keempat Edisi Revisi, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan, UGM.

Gibson, 2009. Perilaku Manajemen Organisasi, Cetakan Ketiga, Erlangga: Surabaya.

Hari Purnomo, Setiawan & Zulkiefli Manysah. 2007. Manajemen

Strategi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Haris, Amirullah, dan Budiyo, 2005. Pengantar Manajemen. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., 2005. Manajemen Strategis. Andi Yogyakarta.

John Ivancevich, 2006. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga: Surabaya

Surwantoro, Gamal. 2006. Dasar-dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.

Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Sinungan, 2010 Produktivitas: Apa dan Bagaimana, Edisi Ke-4, Cetakan Ke-6, Bumi Aksara, Jakarta.

Marpaung Happy. 2006. Pengetahuan Kepariwisata. Alfabeta. Bandung.

Pitana, Gayatri. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.

Pendit Nyoman S. 2007. Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar. Edisi ke-2, Cetakan ke-5. Pradnya Paramita. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2008, Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Aplikasinya, Gramedia Pustaka, Cetakan Keempat Revisi: Jakarta.

Yoeti, Oka. 2009. Tours and Travel Marketing. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

## Sumber Lainnya:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional

- (RIPPARNAS). Lembaran Negara Tahun 2011.
- Jurnal Hartanti. 2012. "Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia", Jurnal Liquidity". Volume 1 Nomor 2 : 153-158.
- Jurnal Nandi. 2008. "Pariwisata dan Pengebangan Sumberdaya Manusia", Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi". Volume 8 Nomor 1 : 1-9.
- Jurnal Dody Prayogo. 2011 "Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development pada Industri Tambang dan Migas", Jurnal Sosial Humaniora". Volume 15 Nomor 1 : 43-58